BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 24 Nomor 3, November 2024 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure



Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum dengan frekuensi terbitan tiga kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret, Juli, dan November yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) (Legalisasi Badan Hukum Perkumpulan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013). Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan berbagai permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia pada khususnya dan masyarakat hukum pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 177/E/KPT/2024 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024 tanggal 15 Oktober 2024, menetapkan bahwa Jurnal Penelitian Hukum De Jure mendapat peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2). Dalam pengelolaannya, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPH-18.LT.04.03 TAHUN 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Tahun Anggaran 2024, dengan tim sebagai berikut:

Pembina:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah:

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum/Redaksi:

Ahyar, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Anggota Dewan Redaksi:

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Universitas Muslim Indonesia-Makassar, Sulawesi Selatan)
Dr. dr. Trini Handayani, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana-Cianjur, Jawa Barat)
Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana-Cianjur, Jawa Barat)
Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanudin – Makassar, Sulawesi Selatan)
Marulak Pardede, S.H., M.H. (BRIN)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (BRIN)
Henry Donald Lbn Toruan, S.H., M.H. (BRIN)
Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum.
Muhaimin, S.H., M.H.

Editor Pelaksana:

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris:

Dra. Evy Djuniarti, M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Asisten Editor:

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Lindung Budi Mulyawan, S.H.
Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.
Mira Sukmawati, S.I.P
B. Lora Christyanti, S.I.P
Amirah Balqis, S.H.
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Teknologi dan Sistem Informasi:
Haddryson, S.H., M.H.
Mochamad Arip, S.Kom.
Andi Rarung, S.H., M.H.
Agus Priyatna, S.Kom.
Fadillah Said, S.Kom.
Harysandy Permana, S.Kom.
Adi Octaviantara, A.Md.
Tegar Christopher Yolanda, S.I.P.
Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Mitra Bestari:

1. Muhammad Rafi Darajati, S.H.,M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat)
2. Vifi Swarianata, S.H, M.H.(Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo)
3. Prof. Dr. Iza Rumesten RS.. S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan)
4. Orin Gusta Andini, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur)
5. Dr. Aan Aswari, S.H., M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan)
6. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H, L.LM. (Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, DKI Jakarta)

Alamat Redaksi:
Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 2525015, Fax: (021) 2526438

Email:
balitbangkumham@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

ADVERTORIAL v

KUMPULAN ABSTRAK vii

The Role of AALCO in Transnational Crime Asset Recovery: A Legal Perspective on Asia-Africa Cooperation 67-84

Carissa Amanda Siswanto, Nafis Dwi Kartiko

Implementasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah 85-102

Heni Susila Wardoyo

Mewujudkan Keadilan Realitas dalam Putusan Penguasaan Anak Melalui Pendekatan Interkoneksi Sistem 103-114

M. Beni Kurniawan

Model Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi dalam Aksi Filantropi *Crowdfunding* 115-132

Deli Bunga Saravistha, I Nyoman Gede Surya Mataram

Politics of Land Grabbing: The Silent Death of Emancipation in Agrarian Law 133-150

Rofi Wahanisa, Syahwal, Eko Mukminto

PROFIL PENULIS xi

PETUNJUK BAGI PENULIS xv

TEMPLATE (MODEL) NASKAH xvii

ADVERTORIAL

Syukur ke hadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, bekerja sama dengan Perhimpunan Peneliti Hukum Indonesia dapat terbit kembali Jilid 25 Nomor 2 Juli 2025.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jilid 25 Nomor 2 Juli 2025 memuat 5 (lima) artikel dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia maupun civitas akademika. Untuk meningkatkan perbaikan sistem hukum dan perundang- undangan, diperlukan upaya perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, redaktur Jurnal Riset De Jure Jilid 25 Nomor 2 Juli 2025 mengangkat pasal-pasal antara lain *The Role of AALCO in Transnational Crime Asset Recovery: A Legal Perspective on Asia-Africa Cooperation;* Implementasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah; Mewujudkan Keadilan Realties dalam Putusan Penguasaan Anak Melalui Pendekatan Interkoneksi Sistem; Model Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi dalam Aksi Filantropi Crowdfunding; *Politics of Land Grabbing: The Silent Death of Emancipation in Agrarian Law.* Melalui tulisan-tulisan tersebut, mereka dapat menyumbangkan pemikiran yang menjadi bahan referensi dalam memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah memercayai Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, meneliti dan mengoreksi tulisan-tulisan penulis dalam publikasi ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan Himpunan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan menerbitkan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Editor:

Jakarta, Juli 2025

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Carissa Amanda Siswanto, Nafis Dwi Kartiko

The Role of AALCO in Transnational Crime Asset Recovery: A Legal Perspective on Asia-Africa Cooperation

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 25, Nomor 2, Juli 2025, Halaman 67-84

The Asia-African Legal Consultative Organization (AALCO), as an intergovernmental organization in Asia and Africa, possesses significant potential to facilitate cooperation among member states in combating transnational crimes and recovering assets. The objective of this study is to explore and analyze the role of the Asia-African Legal Consultative Organization (AALCO) in the international legal framework governing asset recovery of assets arising from criminal activities. The research method used is normative-dogmatic juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. This research uses primary legal sources, such as laws and international treaties, as well as secondary legal sources, such as journals, articles, books, and comments on judges' decisions. The findings of this study indicate that AALCO has an important role in facilitating cooperation among its member states for the recovery of assets derived from criminal activities. AALCO has developed mechanisms such as conventions and guidelines to guide member states in asset recovery. However, this research also found limitations, such as the lack of harmonization of laws among the member states and limited institutional capacity in some states. In addition, there are still challenges in cross-jurisdictional coordination and a lack of public awareness on the importance of asset recovery. In light of these findings, this research recommends AALCO to strengthen a uniform legal framework and improve training and capacity building for law enforcement. In addition, AALCO also needs to strengthen information networks among member states and build partnerships with international organizations. By implementing these recommendations, AALCO can be more effective in supporting efforts to recover assets derived from criminal conducts in the Asia and Africa region.

Keywords: AALCO; Asset Recovery; Crime

Heni Susila Wardoyo

Implementasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 25, Nomor 2, Juli 2025, Halaman 85-102

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada pelibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU). Kabupaten Purworejo dipilih karena memiliki dinamika pembangunan desa yang cukup kompleks, dan kebutuhan studi kasus yang ingin menunjukkan adanya gap implementasi antara kebijakan pusat, daerah, dan desa dalam konteks peraturan desa. Meskipun Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mewajibkan keterlibatan perancang dalam setiap tahap penyusunan peraturan, peraturan pelaksana seperti Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 belum mengakomodasi ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif dan teori implementasi kebijakan Grindle sebagai kerangka analisis utama, yang mencakup dimensi *content of policy* dan *context of implementation*. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan sembilan aktor kunci dari tingkat desa hingga pusat, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berupa lemahnya kejelasan tujuan Perdes, kekurangan sumber daya teknis, dan rendahnya kualitas substansi hukum bersumber pada tidak hadirnya Perancang PUU. Selain itu, fragmentasi kelembagaan, minimnya dukungan regulatif, serta ketidakterjangkauan pembinaan turut memperburuk implementasi kebijakan. Pendekatan Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results (SOAR) digunakan untuk merumuskan strategi optimalisasi. Tiga strategi bertahap ditawarkan: pengembangan platform digital keterlibatan Perancang PUU (jangka pendek), revisi Permendagri 111/2014 (jangka menengah), dan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 (jangka panjang). Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa pelibatan Perancang PUU secara sistemik merupakan kunci optimalisasi implementasi kebijakan penyusunanperaturan desa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Desa

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

M. Beni Kurniawan
Mewujudkan Keadilan Realitas dalam Putusan Penguasaan Anak Melalui Pendekatan Interkoneksi Sistem
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 25, Nomor 2, Juli 2025, Halaman 103-114

Salah satu klasifikasi perkara yang menjadi yurisdiksi absolut pengadilan agama adalah sengketa penguasaan anak. Sepanjang tahun 2023 terdapat 1526 (seribu lima ratus dua puluh enam) perkara sengketa penguasaan anak yang telah disidangkan dan diputus oleh seluruh pengadilan agama di Indonesia. Problematikanya meskipun pengadilan telah memutus pemegang kuasa asuh yang sah dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, realitanya banyak dari putusan pengadilan tidak diindahkan pihak yang kalah dipicu oleh beberapa faktor antara lain dengan menyembunyikan anak, membawa kabur anak, atau menghasut anak sehingga berdampak kepada tidak bisa dilaksanakannya (*non executionable*) putusan hak asuh anak. Berangkat dari persoalan tersebut, tulisan ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur perihal hak asuh anak dan bagaimana pelaksanaan putusan hak asuh anak di Indonesia melalui pendekatan teori interkoneksi sistem. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah yuridis normatif dengan meneliti dokumen-dokumen hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Temuan penulis dalam penelitian ini bahwa untuk terwujudnya keadilan realitas di dalam putusan hak asuh anak, Lembaga peradilan harus menerapkan interkoneksi sistem dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti KemenPPPA, Kemendagri, Bank Indonesia, Kementerian Agama, BPJS dan Polri untuk mencegah putusan tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*).

Kata Kunci: keadilan realitas; penguasaan anak; interkoneksi sistem.

Deli Bunga Saravistha, I Nyoman Gede Surya Mataram
Model Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi dalam Aksi Filantropi *Crowdfunding*
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 25, Nomor 2, Juli 2025, Halaman 115-132

Donasi berbasis online atau dikenal dengan crowdfunding kini semakin marak sejak saat era Covid melanda dan menjadi fenomena sosial baru hingga sekarang. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai platform penghimpun donasi di Indonesia dan menyebabkan Indonesia menjadi negara paling dermawan berdasarkan hasil survei *Charities Aid Foundation* (CAF) *World Giving Index* 2021. Regulasi yang menjadi dasar aktifitas ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Berbagai kasus mulai bermunculan dengan berbagai modusnya namun regulasi yang ada belum optimal mengakomodasi ekspektasi masyarakat khususnya donatur yang beritikad baik dan peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan menemukan Model Pengaturan Hukum yang efisisen dengan analisis pendekatan pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi sebagai bentuk perbaikan arah/tujuan/ re-orientasi penanganan kasus CF di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan bantuan Teori Hukum Responsif sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih responsif yang memandang bahwa sistem hukum tidak luput dari pengaruh subsistem lainnya salah satunya subsistem ekonomi dengan model pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi yang juga dilakukan berdasarkan Asas Restoratif Justice, tanpa mencederai kewibawaan hukum pidana. Rekomendasi yang ditawarkan untuk optimalisasinya adalah pembaharuan terhadap regulasi yang sudah tidak mampu menjangkau pola-pola *crowdfunding* berbasis sosial media yang tidak hanya menyebar dalam waktu singkat melainkan dapat menembus batas yurisdiksi sebuah negara.

Kata Kunci: *crowdfunding*, model pemidanaan, kerugian ekonomi

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Rofi Wahanisa, Syahwal, Eko Mukminto

Politics of Land Grabbing: The Silent Death of Emancipation in Agrarian Law

The De Jure Legal Research Journal Volume 25, Number 2, July 2025, Page 133-150

In the midst of Indonesia's ongoing wave of development, agrarian conflicts that manifest in land grabbing have become increasingly prominent, despite frequently lacking clear legal justification. This study critically examines the role of law in facilitating and grabbing and interrogates the mechanism through which legal frameworks come to serve such a function. It addresses a significant gap in the scholarly discourse concerningthe legal dimensions of land dispossession. Employing a non-doctrinal approach, this research draws upon an extensive literature studies, regulatory analysis, and judicial decision reviews. The findings reveal that land grabbing in Indonesia is not merely driven by informal practices or extralegal coercion. Rather, it is frequently facilitated through legal instruments, most notably within the framework of National Strategic Projects (PSN). These projects demonstrate how the law is mobilized to legitimize dispossession, masking structural violence behind the veneer of legality. In this context, the emancipatory vision of Indonesian agrarian law faces systemic erosion. Rather than fading passively, it is actively dismantled under the influence of neoliberal imperatives embedded in post-1997 policy reforms. Ultimately, this study shows that law is not a neutral arbiter in agrarian conflict, but a powerful tool of accumulation by dispossession.

Keywords: agrarian conflict; land grabbing; legal policy; neoliberalism